

**HUBUNGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Syamsu Rizal

Tri Suari

(Universitas Bandar Lampung)

Email : syamsu.rizal23@yahoo.co.id

Email : Trisuari@yahoo.co.id

Abstract

The research conducted there is not aimed at the relationship between financial accounting system area with quality accountability on the administration of the city of Bandar Lampung. The Data used in this research was the qualitative data in the form of a questionnaire which is processed into quantitative data with the forms of tabulate data. Test data was conducted to test the validity, reliability, and normality. Test your hypothesis by using correlation method of product moment. Results of this study stated that the financial accounting system of regional relations in the agency financial management Asset & Bandar Lampung city areas were in accordance with the established guidelines. All cycle stages have been run well. So too with the completeness of his or her financial report items were in accordance with the provisions of the financial statements comprising a SKPD Report realization of budget, balance sheet, and notes to the financial statements.

Record-keeping and transaction classification comes from ledger, evidence which was recorded in a book journal. For those transactions are the same, recorded in the book of specialized journals. Transactions have been recorded and classified in a journal, each month or other period will be summarized and published in a book of accounts. Accounting Data that have been recorded in the ledgers of accounts presented in the form of financial statements that report the realization of the budget, the balance sheet and notes to the financial statements.

Keywords: system financial accounting, Financial report,

1. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi di atas menunjukkan bahwa semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin

anggaran. Arus reformasi yang terjadi saat ini juga menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan yang dinyatakan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipersepsikan bahwa penyusunan dan nilai-nilai yang tercantum dalam LKPD dinilai wajar dan telah sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan disusunnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penurunan persentase LKPD yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat menjadi salah satu sinyal atau isyarat buruk dalam hal kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah ditinjau dari sisi opini auditor atas laporan keuangan.

2. Telaah Literature dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori yang mendasari

Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systēma*) dan bahasa Yunani (*Sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Dari penjabaran pengertian tentang sistem diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa sistem itu memang kompleks dan sangat terkait dengan hal yang ada didalamnya, karena sistem tidak akan jalan apabila salah satu elemen sistem tersebut tidak jalan.

Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan.

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Sistem sebagaimana yang dimaksud di atas adalah suatu sistem di antara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola suatu organisasi. Sistem akuntansi itu sendiri, terdiri sekumpulan prosedur yang dimaksudkan untuk mengorganisasikan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 (2006:76) yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”.

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri dari empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, asset dan selain kas (*Halim : 2007*)

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan / atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

3. **Prosedur Akuntansi Aset**

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai / digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

4. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan /atau SKPKD.

Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan eksternal. Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta evaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Dipertegas dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Hak Daerah tersebut meliputi antara lain :

1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 & UU No. 34 Tahun 2000).
2. Hak untuk menarik retribusi / iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 & UU No. 34 tahun 2000).
3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004).
4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah di atur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Standar umum pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut (*Halim : 2007*) :

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- c. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian- kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- d. Mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan (*Halim : 2007*), yaitu :

1. **Pertanggung Jawaban**

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. **Manajerial**

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja.

3. **Pengawasan**

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif (Bastian : 2006) yaitu : relevan, mudah dipahami, andal, dan dapat diperbandingkan.

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi keuangan yang relevan meliputi :

a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi keuangan harus disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. Penyajian jujur

b. Dapat diverifikasi

c. Netralitas

3. Dapat dibandingkan
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pengertian Kualitas

Menurut *Juran (1962) dalam Lumbono (2007)*, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Menurut *Elliot (1993) dalam Lumbono (2007)*, kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbedadan tergantung pada waktu dan tempat atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut *American Society for Quality Control*, kualitas adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tampak jelas maupun tersembunyi (*Render dan Herizer, 1997:92*). Ada delapan dimensi kualitas menurut *Kotler (2000:329-333)* adalah sebagai berikut :

1. Kinerja (*Performance*) : karakteristik operasi suatu produk utama
2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*Feature*)
3. Kehandalan (*Reliability*) : probabilitas suatu produk tidak berfungsi atau gagal
4. Kesesuaian dengan spesifikasi (*Conformance To Specifications*)
5. Daya Tahan (*Durability*)
6. Kemampuan melayani (*Serviceability*)
7. Estetika (*Esthetic*): bagaimana suatu produk dipandang dirasakan dan didengarkan
8. Ketepatan kualitas yang dipersepsikan (*Perceived Quality*).

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi

Kata populasi (*population*) dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek penelitian. Menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 30 orang pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari :

Table 1
Hasil Penelitian pada Badan Pengelolaan
Keuangan & Aset Daerah Kota Bandar Lampung

No	Umur	Jabatan	Jenis Kelamin	Lama Menjabat	Basic Pendidikan
1	18	Staf	Perempuan	<3 Tahun	
2	22	Staf	Perempuan	<3 Tahun	Non-Akuntansi
3	25	PNS	Perempuan	<3 Tahun	
4	27	Staf	Perempuan	< 3 Tahun	
5	28	PNS	Perempuan	< 3 Tahun	Akuntansi
6	28	Staf	Perempuan	4-5 Tahun	
7	29	Staf	Perempuan	<3 Tahun	Akuntansi
8	29	Staf	Laki-laki	4-5 Tahun	
9	31	Staf	Laki-laki	< 3 Tahun	
10	31	Staf	Perempuan	<3 Tahun	Akuntansi
11	33	Staf	Perempuan	4-5 Tahun	
12	34	PNS	Perempuan	4-5 Tahun	Akuntansi
13	34	PNS	Perempuan	>10 Tahun	Akuntansi
14	35	Staf	Laki-laki	4-5 Tahun	Akuntansi
15	38	PNS	Perempuan	4-5 Tahun	Akuntansi
16	38	Staf	Perempuan	>10 Tahun	Non-Akuntansi
17	39	Staf	Perempuan	4-5 Tahun	Non-Akuntansi
18	40	Staf	Perempuan	> 10 Tahun	Akuntansi
19	40	Staf	Perempuan	4-5 Tahun	
20	40	Staf	Perempuan	10 Tahun	Akuntansi
21	40	PNS	Perempuan	4-5 Tahun	Akuntansi
22	40	Staf	Perempuan	>10 Tahun	Akuntansi
23	40	PNS	Perempuan	4-5 Tahun	Non-Akuntansi
24	41	PNS	Perempuan	4-5 Tahun	Non-Akuntansi
25	44	PNS	Perempuan	>10 Tahun	Non-Akuntansi
26	45	Staf	Perempuan		Akuntansi
27	45	Staf	Perempuan	10 Tahun	Akuntansi
28	45	Staf	Perempuan	10 Tahun	Akuntansi
29	45	PNS	Laki-laki	>10 Tahun	
30	50	PNS	Perempuan	>10 Tahun	Akuntansi

3.2 Sampel

Menurut *Sugiono*, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut. Untuk menentukan berapa banyak sampel minimal yang dibutuhkan jika populasi diketahui, menurut *Supramono dan Intiyas Utami (2004)* dalam *Hidayat (2011)* dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Dimana :

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

d : Prosentase kelonggaran ketidaktelitian 15%

Menurut *Roscoe (1975)* yang dikutip *Uma Sekaran (2006)* Apabila populasi berjumlah dibawah 100 orang ,maka semua populasi dijadikan sampel.Dalam penelitian ini karena populasinya sebanyak 30 orang maka semua populasi dijadikan sampel,sehingga penelitian ini merupakan penelitian survey.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut *Sugiono*, variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel menjelaskan variabel-variabel dengan fungsi atau kedudukan sebagai variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

1. Variabel Independent (X) atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya Variabel Dependent (terikat). Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Variabel Dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Data yang menjadi variabel terikat (Variabel Y) adalah Kualitas Laporan Keuangan.

Agar variabel-variabel penelitian ini dapat dioperasionalkan dalam penelitian, maka perlu disusun matrik operasional variabel sebagai berikut :

Table 2
Matrik Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	No.Kuesioner
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1. Prosedur akuntansi penerimaan kas 2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas 3. Prosedur akuntansi aset 4. Prosedur akuntansi selain kas	Interval	1-5 6-10 10-15 16-20
Kualitas Laporan Keuangan	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Interval	1-8 9-13 14-17 18-20

Sumber Indikator : Permendagri No.13 tahun 2006 dan PP No.71 tahun 2010

Indikator dari setiap variabel di atas dijadikan dasar untuk menyusun daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.

3.4 Data

Penulis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

4. Hasil dan Penelitian

4.1 Analisis Kualitatif

Setelah diadakan pengumpulan data dari responden penelitian yang berjumlah 30 orang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pada penyebaran angket, maka dalam menganalisis data pada analisis kualitatif ini akan dipergunakan analisis statistik yang kemudian data – data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Menurut *Hadi (2001)*, adapun cara penggolongan data tersebut adalah dengan menggunakan rumus interval, yaitu :

$$I = \frac{Nt - Nr}{K}$$

Dimana :

I = Interval

Nt = Nilai Skor Tertinggi

Nr = Nilai Skor Terendah

K = Kategori

Analisis tersebut, akan diuraikan pada penjelasan berikut :

1. Berdasarkan pada hasil pengumpulan data tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka hasil skornya dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Skor Tertinggi = 100

b. Skor Terendah = 20

$$I = \frac{N_t - N_r}{K} = \frac{100 - 20}{5} = 16$$

Skor tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibagi lagi menjadi 5 (lima) kategori dengan ketentuan:

- Sangat Kuat = 84 – 100 Selalu
- Kuat = 68 – 83 Sering
- Sedang = 52 – 67 Kadang-Kadang
- Lemah = 36 – 51 Jarang
- Sangat Lemah = 20 – 35 Tidak Pernah

Untuk lebih jelasnya tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Hasil penelitian terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Jawaban responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sangat Kuat (84 – 100)	29	96,67%
Kuat (68 – 83)	1	3,33%
Sedang (52 – 67)	0	0%
Lemah (36 – 51)	0	0%
Sangat Lemah (20 – 35)	0	0%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa sebanyak 29 dari 30 responden atau 96,67% dalam kategori sangat kuat dan 1 orang dari 30 responden atau sebanyak 3,33% dalam kategori kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden dalam menjawab pertanyaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sangat kuat. Sedangkan untuk Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Hasil penelitian terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Jawaban responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sangat Kuat (84 – 100)	27	90%
Kuat (68 – 83)	3	10%
Sedang (52 – 67)	0	0%
Lemah (36 – 51)	0	0%
Sangat Lemah (20 – 35)	0	0%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa sebanyak 27 dari 30 responden atau 90% dalam kategori sangat kuat dan 3 orang dari 30 responden atau sebanyak 10% dalam kategori kuat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam menjawab pertanyaan Kualitas Laporan Keuangan adalah sangat kuat.

4.2 Analisis Kuantitatif

Statistik Deskriptif

Tabel 5
Statistics

		SAKD	KAK
N	Valid	30	30
	Missing	0	0
Mean		92.2667	91.6000
Std. Deviation		4.89147	5.41772
Minimum		82	78
Maximum		98	97

Secara umum dari keseluruhan sampel, nilai maksimum variabel X (SAKD) adalah 98 dengan nilai minimum 82. Rata-rata variabel SAKD adalah 92.2667. Nilai maksimum variabel Y (KAK) adalah 97 dengan nilai minimum 78. Rata-rata variabel KAK adalah 91.6000.

Uji Validitas

Menurut Cooper (2006 : 720), validitas adalah suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa

yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dalam penelitian ini, pengujian data dapat juga dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data tersebut. Hasil pengujian dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 6
Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Variabel	Pearson Corelation	Signifikansi	Keterangan
SAKD1	0,415	0,05	VALID
SAKD2	0,410	0,05	VALID
SAKD3	0,459	0,05	VALID
SAKD4	0,368	0,05	VALID
SAKD5	0,495	0,01	VALID
SAKD6	0,453	0,05	VALID
SAKD7	0,389	0,05	VALID
SAKD8	0,444	0,05	VALID
SAKD9	0,526	0,01	VALID
SAKD10	0,408	0,05	VALID
SAKD11	0,381	0,05	VALID
SAKD12	0,441	0,05	VALID
SAKD13	0,436	0,05	VALID
SAKD14	0,374	0,05	VALID
SAKD15	0,460	0,05	VALID
SAKD16	0,460	0,05	VALID
SAKD17	0,504	0,01	VALID
SAKD18	0,548	0,01	VALID
SAKD19	0,472	0,01	VALID
SAKD20	0,442	0,05	VALID

Sumber : data primer diolah SPSS

Keterangan :

SAKD1 : Pertanyaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah No.1

Tabel 7
Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Variabel	Pearson Corelation	Signifikansi	Keterangan
KLK1	0,522	0,01	VALID
KLK2	0,478	0,01	VALID
KLK3	0,556	0,01	VALID
KLK4	0,545	0,01	VALID
KLK5	0,444	0,05	VALID
KLK6	0,450	0,05	VALID
KLK7	0,529	0,01	VALID
KLK8	0,504	0,01	VALID
KLK9	0,437	0,05	VALID
KLK10	0,363	0,05	VALID
KLK11	0,415	0,05	VALID
KLK12	0,464	0,01	VALID
KLK13	0,514	0,01	VALID
KLK14	0,457	0,05	VALID
KLK15	0,388	0,05	VALID
KLK16	0,500	0,01	VALID
KLK17	0,520	0,01	VALID
KLK18	0,531	0,01	VALID
KLK19	0,535	0,01	VALID
KLK20	0,372	0,05	VALID

Sumber : data primer diolah SPSS

Keterangan :

KLK1 : Pertanyaan Kualitas Laporan Keuangan No.1

Dari tabel 6 dan 7 di atas, diketahui semua pertanyaan untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan Kualitas Laporan Keuangan adalah valid. Dikatakan valid karena Pearson Corelation tiap pertanyaan lebih besar dari r tabel yaitu 0,361.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan metode untuk mengukur suatu jawaban pertanyaan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pada uji reliabilitas, konsistensi internal koefisiensi Cronbach's Alpha menunjukkan tidak ada koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
SAKD	0,718	Reliabel
KAK	0,729	Reliabel

Sumber : data primer diolah SPSS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua variabel menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 0,60, maka disimpulkan semua variabel adalah reliabel.

Uji Korelasi

Uji korelasi membahas derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y, sedangkan koefisien korelasi merupakan ukuran yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar atau kuat derajat hubungan yang terjadi antara variabel-variabel tersebut. Korelasi ini digunakan untuk mengukur kuat lemahnya arah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Tabel 9
Hasil Uji Korelasi Correlations

		SAKD	KAK
SAKD	Pearson Correlation	1	.728**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
KAK	Pearson Correlation	.728**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Dari hasil di atas menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dan diperoleh r hitung sebesar 0,728. Berdasarkan konsultasi yang dilakukan jika dihubungkan dengan tabel tingkat hubungan korelasi sebesar 0,728 terletak diantara 0,600 – 0,799 yang menunjukkan kriteria hubungan yang kuat.

Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2). Nilai (r^2) mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq r^2 \leq 1$). Semakin besar r^2 (mendekati 1), maka semakin baik hasilnya. Semakin mendekati 0, maka variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 10
Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 ^a	.529	.513	3.78215

a. Predictors: (Constant), SAKD

Dari hasil di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,529 atau 52,9%. Artinya bahwa sistem akuntansi keuangan daerah menjelaskan 52,9% kualitas laporan keuangan dan sisanya sebesar 47,1 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang telah penulis ajukan sebelumnya, maka di dalam pengujian ini ingin diketahui apakah uji hipotesis diterima atau ditolak. Dalam hal ini penulis menggunakan uji t dengan metode *product moment* lalu akan dibandingkan dengan t_{tabel} .

Dasar pengambilan keputusan:

Ho diterima jika $-t_{(1/2 \alpha, df)} < t < t_{(1/2 \alpha, df)}$

Ho ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

Tabel 11
Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.241	13.266		1.300	.204
	SAKD	.806	.144	.728	5.613	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,613 > 2,048$ maka Ho ditolak. Ini menunjukkan hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini yaitu ada hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Bandar Lampung.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat dalam buku jurnal khusus. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode yang lain akan diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening buku besar tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran , neraca dan catatan atas laporan keuangan.
2. ada hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kota Bandar Lampung. Sistem akuntansi keuangan daerah menjelaskan 52,9% kualitas laporan keuangan dan sisanya sebesar 47,1 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, maka penulis memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolahan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Disarankan untuk dapat mengadakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia secara berkala untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga sistem akuntansi keuangan daerah yang telah diterapkan mampu dijalankan dengan maksimal dan meminimalisasi waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk lebih mengkaji masalah sejenis di masa yang akan datang tetapi diusahakan untuk tidak melakukan penelitian pada akhir tahun dikarenakan tuntutan pembuatan laporan pertanggungjawaban tahunan

Daftar Pustaka

Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

C. Trihendradi. 2011. *Langkah Mudah Melakukan Analisis statistik Menggunakan SPSS 19*. Yogyakarta : Penerbit ANDI

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Abdul, Hafiz Tanjung. 2009. *Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Bahan Ajar Akuntansi Sektor Publik. Universitas Nasional Pasim.

Carino, L.V. 1991. *Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts*. Asian Review of Public Administration, Vol. III. No. 2.

Cooper, D.R. 2006. *Business Research Method 9th edition*. India: McGraw-Hill Education.

Ghartey, J.B. 1987. *Crisis, Accountability and Development in the Third World*. London.

Hari, Lumbono. 2007. *Pengendalian Kualitas Produksi Garment di PT. Asrindo Indty Raya dengan Menggunakan Diagram Kontrol*. Tugas Akhir Diploma 3. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Iman, Firmansyah. 2008. *Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung

M. Taufik Hidayat. 2011. *Pengaruh Faktor-Faktor Akuntabilitas Auditor dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Auditor*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang

Stanbury, W.T. 2003. *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Canada: Fraser Institute Digital Publication.

Von Bertalanffy, Ludwig. *An Outline of General System Theory*. The British Journal for the Philosophy of Science Vol. 1, No. 2 (Aug, 1950). pp. 134-165.

Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

http://www3.hafizkonsultan.com/artikel/file_artikel/Sistem%20Akuntansi%20Keuangan%20Daerah.pdf

<http://www.scribd.com/doc/65767643/4/Prinsip-prinsip-Total-Quality-Management>

<http://www.damandiri.or.id/file/setiawanwicaksonounbrawbab2.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17482/3/Chapter%20II.pdf>

http://repository.upi.edu/operator/upload/s_e0751_045709_chapter3.pdf

http://samsudinrembank.blogspot.com/2010/01/populasi-dan-sampel-penelitian_23.html

<http://www.scribd.com/doc/25969131/Populasi-Dan-Sampel>

http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_0705621_chapter3.pdf

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/490/jbptunikompp-gdl-heninurhae-24471-5-unikom_h-i.pdf